

TRANSFORMASI PERAN SOSIAL PEREMPUAN JAWA TIMUR DALAM PERTEMPURAN 10 NOVEMBER 1945

Ade Wandi Nurdiansyah¹, Azka Ridwan Aulia², Derafly Rizky Wahyudi³, Annisa Maharani⁴, Mira Rianti⁵, Bakhita Setyorini⁶, Ummu Salamah⁷, Andi Kusmawan⁸,
Puspita Anggraeni⁹, Ikoh Komala Sari¹⁰, Yulia Sofiani¹¹
adewandinurdiansyah@gmail.com¹, azkaridwan024@gmail.com², rafllyrizky666@gmail.com³,
annisamdp22@gmail.com⁴, mirarianti62@gmail.com⁵, bakhita05setyorini@gmail.com⁶,
ummussalamah55@gmail.com⁷, andykusmawan1373@gmail.com⁸,
puspitanggraeni09@gmail.com⁹, ikohkomalasari8@gmail.com¹⁰, yuliasofiani@unsil.ac.id¹¹

Universitas Siliwangi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Transformasi Peran Sosial Perempuan Jawa Timur dalam Pertempuran 10 November 1945” yang bertujuan menelusuri dinamika perubahan peran sosial perempuan dalam konteks revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya pada peristiwa heroik di Surabaya tahun 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis serta pendekatan sejarah sosial untuk mengkaji bagaimana perempuan berperan sebagai agen sosial dalam situasi revolusi. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen terhadap sumber-sumber sejarah berupa arsip, biografi tokoh, laporan organisasi perempuan, surat kabar masa revolusi, dan karya ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Jawa Timur mengalami pergeseran peran yang signifikan dari ranah domestik menuju ranah publik. Mereka berpartisipasi aktif dalam bidang logistik, medis, komunikasi, hingga perlawanan bersenjata. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan semangat nasionalisme dan solidaritas gender, tetapi juga menjadi cikal bakal munculnya kesadaran emansipatoris di masyarakat pasca-kolonial. Penelitian ini juga menemukan bahwa historiografi nasional masih cenderung menempatkan perempuan sebagai figur pendukung, bukan pelaku utama perjuangan. Oleh karena itu, rekonstruksi sejarah yang berperspektif gender menjadi penting agar perempuan dapat diakui sebagai subjek aktif dalam proses pembentukan bangsa.

Kata Kunci: Perempuan, Jawa Timur, Pertempuran 10 November, Metode Historis, Sejarah Sosial, Historiografi Gender.

ABSTRACT

This study, entitled “The Transformation of East Javanese Women’s Social Roles during the November 10, 1945 Battle”, aims to explore the dynamics of women’s social role transformation in the context of Indonesia’s independence revolution, particularly during the heroic events in Surabaya in 1945. This research employs a qualitative approach using the historical method combined with a social history perspective to analyze women’s roles as social agents during the revolution. Data were collected through literature study and document analysis of historical sources, including archives, biographies, women’s organization reports, wartime newspapers, and scholarly works. The findings reveal that East Javanese women experienced a significant shift from domestic to public roles, actively participating in logistics, medical care, communication, and even armed resistance. This transformation not only reflects the rise of nationalism and gender solidarity but also marks the early emergence of emancipatory awareness in post-colonial society. Furthermore, the study finds that national historiography often positions women as supportive figures rather than active agents of struggle. Hence, a gender-inclusive historiographical reconstruction is crucial to recognize women as active subjects in the nation-building process.

Keywords: Women, East Java, November 10 Battle, Historical Method, Social History, Gender Historiography.

PENDAHULUAN

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu momen paling monumental dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai puncak perlawanan rakyat terhadap kembalinya kekuasaan kolonial, sekaligus menjadi simbol keberanian dan pengorbanan nasional. Di balik euforia heroisme tersebut, terdapat dinamika sosial yang jauh lebih kompleks daripada sekadar konfrontasi bersenjata antara pemuda dan pasukan sekutu. Salah satu aspek yang kerap terlupakan adalah peran signifikan perempuan dalam mendukung jalannya pertempuran, baik secara langsung di medan tempur maupun melalui aktivitas non-militer seperti logistik, perawatan medis, dan penyebaran informasi. Sebagaimana dicatat Reid (2011), perjuangan rakyat Surabaya tidak dapat dipisahkan dari partisipasi kolektif seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, yang memainkan peranan penting dalam menopang keberlangsungan perjuangan kemerdekaan di Jawa Timur.

Namun, konstruksi historiografi nasional yang dominan sering kali mengabaikan kontribusi perempuan dalam peristiwa besar tersebut. Narasi sejarah resmi yang ditulis pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru cenderung menempatkan perempuan sebagai figur pendukung atau “pelengkap” dari perjuangan laki-laki. Menurut Hatley (1999), bias patriarkal dalam historiografi Indonesia menyebabkan perempuan sering digambarkan secara simbolik sebagai “ibu bangsa” atau penjaga moral, bukan sebagai aktor politik dan sosial yang memiliki agensi sendiri. Akibatnya, kisah perempuan Surabaya yang turut berjuang dalam pertempuran menjadi terpinggirkan dalam ingatan kolektif bangsa. Pendekatan historiografi gender kemudian menjadi penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dan membuka ruang bagi rekonstruksi sejarah yang lebih inklusif.

Keterlibatan perempuan Jawa Timur dalam perjuangan kemerdekaan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi sosial dan politik yang telah berlangsung jauh sebelum 1945. Pada dekade 1930-an, munculnya organisasi perempuan seperti Putri Indonesia dan Poetri Raden Ayu Indonesia telah mananamkan kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan, kemandirian ekonomi, dan partisipasi sosial perempuan (Blackburn, 2004). Ketika revolusi kemerdekaan meletus, kesadaran ini bermetamorfosis menjadi tindakan konkret di lapangan. Perempuan tidak lagi sekadar menjadi pendukung moral, tetapi juga menjadi bagian dari struktur sosial baru yang menuntut peran aktif mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Kesadaran kolektif ini menjadi fondasi bagi transformasi sosial yang terjadi selama pertempuran Surabaya.

Dalam konteks pertempuran 10 November, perempuan memainkan berbagai peran strategis yang melampaui batas-batas domestik tradisional. Mereka mendirikan dapur umum untuk memberi makan para pejuang, mengatur jalur suplai makanan dan obat-obatan, serta berpartisipasi dalam kegiatan medis dengan mendirikan pos pertolongan pertama bagi korban pertempuran (Dewi, 2017). Beberapa di antaranya juga menjadi kurir rahasia dan penghubung antarpos perjuangan, menunjukkan keberanian dan ketangkasannya luar biasa di tengah situasi berbahaya. Fakta ini menunjukkan bahwa batas antara ranah domestik dan publik telah luntur akibat tuntutan perjuangan. Dalam istilah Habermas (1984), perubahan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk transformasi sosial komunikatif, di mana perempuan secara aktif menegosiasikan ulang perannya melalui tindakan kolektif di ruang publik.

Lebih jauh lagi, pergeseran ini memperlihatkan bagaimana kondisi revolusi menjadi katalis bagi terbentuknya identitas sosial baru bagi perempuan Jawa Timur. Kondisi perang mendorong mereka untuk beradaptasi dengan cepat dan menempati posisi yang sebelumnya tidak diakui secara sosial. Suryomenggolo (2018) mencatat bahwa

keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan ruang publik selama masa revolusi menunjukkan proses emancipatory labor, di mana pengalaman sosial dan politik membuka ruang baru bagi kesadaran gender. Dengan demikian, pertempuran Surabaya tidak hanya menjadi simbol perjuangan fisik, tetapi juga menjadi medan dialektika antara tradisi patriarkal dan aspirasi emancipatoris.

Namun sayangnya kontribusi penting ini jarang mendapat tempat yang layak dalam wacana sejarah nasional. Representasi perempuan dalam literatur sejarah sering kali terjebak dalam narasi romantis atau moralistik yang menekankan pengorbanan tanpa mengakui kapasitas politik mereka. Hatley (1999) mengkritik kecenderungan ini sebagai bentuk gendered silencing—penghapusan simbolik yang secara tidak langsung meniadakan agensi perempuan. Dalam konteks akademik, kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan historiografi yang lebih kritis dan interdisipliner, menggabungkan perspektif sejarah sosial, gender, dan budaya.

Selain sebagai aktor sosial perempuan juga memainkan peran kultural penting dalam mempertahankan moral dan semangat perjuangan. Mereka menjadi penggerak propaganda lokal, menyebarkan berita kemenangan, menulis selebaran, dan mengorganisasi kegiatan sosial untuk menguatkan solidaritas antarwarga. Dalam hal ini, perempuan bukan hanya caretakers tetapi juga communicators yang menjaga arus informasi di tengah kekacauan perang. Vickers (2005) menekankan bahwa kontribusi perempuan pada level simbolik ini turut memperkokoh identitas nasional yang sedang dibangun, di mana perjuangan kemerdekaan dimaknai sebagai proyek kolektif lintas gender.

Transformasi sosial ini tidak dapat dilepaskan dari faktor ideologis yang berkembang pada masa itu. Nasionalisme Indonesia pasca-proklamasi membawa ide tentang kesetaraan warga negara yang, meski belum sepenuhnya terwujud, memberi ruang bagi perempuan untuk mengartikulasikan peran mereka dalam narasi kebangsaan. Blackburn (2004) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam revolusi memperkuat legitimasi mereka untuk menuntut hak-hak politik dan sosial setelah kemerdekaan. Dengan demikian, pertempuran 10 November menjadi titik tolak penting bagi perubahan persepsi sosial terhadap perempuan Indonesia, dari “pengabdi rumah tangga” menjadi “pengabdi bangsa”.

Meski demikian, perubahan peran ini tidak berjalan tanpa resistensi. Nilai-nilai patriarkal yang mengakar dalam budaya Jawa masih memandang peran perempuan secara terbatas. Namun, konteks krisis politik dan militer membuka celah bagi renegosiasi peran sosial tersebut. Handayani (2021) mencatat bahwa perempuan-perempuan Jawa Timur pasca-pertempuran tetap melanjutkan kiprah mereka dalam organisasi sosial dan politik, memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan perempuan. Fenomena ini memperlihatkan kesinambungan historis antara pengalaman revolusioner 1945 dan kebangkitan gerakan perempuan Indonesia pasca-kemerdekaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam transformasi peran sosial perempuan Jawa Timur dalam Pertempuran 10 November 1945 melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Dengan menelusuri berbagai sumber akademik, arsip sejarah, dan kesaksian kontemporer, kajian ini bertujuan untuk merekonstruksi peran perempuan sebagai agen sosial yang aktif dalam proses revolusi. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya historiografi perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mendorong pembacaan ulang terhadap sejarah nasional melalui lensa gender yang lebih adil dan representatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis dan pendekatan sejarah sosial. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam transformasi peran sosial perempuan Jawa Timur dalam konteks revolusi kemerdekaan Indonesia, khususnya pada peristiwa Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Melalui pendekatan sejarah sosial, penelitian ini berupaya menempatkan perempuan bukan sekadar sebagai figur pendukung, tetapi sebagai agen sosial yang aktif dalam dinamika perjuangan kemerdekaan.

Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku sejarah, jurnal akademik, biografi tokoh, arsip organisasi perempuan, serta surat kabar yang terbit pada masa revolusi. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan untuk menelaah dan menginterpretasikan dokumen-dokumen sejarah, baik primer maupun sekunder, guna memperoleh pemahaman kontekstual tentang peran dan kontribusi perempuan Jawa Timur dalam peristiwa tersebut.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti tahapan metode historis, yang meliputi proses heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik digunakan untuk mengumpulkan dan menyeleksi sumber-sumber sejarah yang relevan. Tahap verifikasi bertujuan untuk menilai keaslian dan kredibilitas sumber yang diperoleh. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan untuk menafsirkan fakta sejarah secara analitis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya pada masa revolusi. Tahap terakhir, historiografi, dilakukan untuk menyusun hasil interpretasi menjadi narasi sejarah yang kronologis dan bermakna. Melalui proses ini, penelitian berupaya merekonstruksi secara komprehensif transformasi peran sosial perempuan Jawa Timur dalam Pertempuran 10 November 1945, serta menempatkan pengalaman dan kontribusi mereka dalam kerangka historiografi yang lebih inklusif dan berperspektif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial-Politik Jawa Timur dan Posisi Perempuan Menjelang Pertempuran 10 November

Pertempuran 10 November 1945 tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial-politik Jawa Timur sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Periode ini merupakan masa transisi yang sangat dinamis, di mana struktur kekuasaan kolonial Belanda yang lama runtuh, namun tatanan republik yang baru belum sepenuhnya terbentuk. Di tengah kekacauan politik ini, muncul mobilisasi sosial yang masif di kalangan rakyat, termasuk perempuan, yang selama masa kolonial cenderung termarginalkan. Reid (2011) menyebut fase revolusi fisik sebagai “masa kelahiran bangsa melalui kekacauan sosial” di mana batas-batas gender dan kelas menjadi cair karena kebutuhan perjuangan.

Secara historis, perempuan di Jawa Timur sebelum 1945 berada dalam posisi subordinat akibat sistem sosial feodal yang diperkuat oleh ideologi kolonial dan interpretasi konservatif terhadap agama. Pendidikan bagi perempuan terbatas, dan pekerjaan di luar rumah dipandang tidak pantas bagi perempuan Jawa. Menurut Hatley (1999), “kolonialisme tidak hanya mengontrol tubuh bangsa, tetapi juga mengatur peran gender untuk mendukung stabilitas kekuasaan.” Akibatnya, ruang gerak sosial perempuan terkungkung dalam ranah domestik dan moralitas tradisional.

Meskipun demikian, embrio kesadaran sosial perempuan Jawa Timur sudah mulai tumbuh sejak awal abad ke-20. Gerakan perempuan seperti Putri Mardika dan Aisyiyah telah memperkenalkan ide pendidikan, kesetaraan, dan partisipasi sosial. Blackburn (2004)

menyatakan bahwa gerakan perempuan Indonesia pra-kemerdekaan “berasal dari sintesis antara modernitas kolonial dan nilai-nilai lokal yang menekankan kehormatan dan tanggung jawab sosial perempuan.” Dengan latar belakang ini, perempuan Jawa Timur memiliki fondasi kultural dan ideologis yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi cepat terhadap situasi revolusioner tahun 1945.

Pasca proklamasi kemerdekaan, Surabaya menjadi kota yang paling dinamis secara politik. Sebagai pelabuhan besar dan pusat industri, kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok sosial: buruh, pelajar, santri, dan veteran. Keanekaragaman ini menciptakan medan sosial yang memungkinkan perempuan untuk masuk dalam jaringan perlawanan. Dewi (2017) mencatat bahwa “di Surabaya, partisipasi perempuan bukan hanya konsekuensi perang, tetapi juga hasil dari pembentukan jaringan sosial lintas kelas.” Hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi perempuan tidak bersifat spontan, melainkan terorganisir secara sosial.

Perubahan peran sosial perempuan juga dipengaruhi oleh krisis ekonomi dan keamanan setelah kekosongan kekuasaan Jepang. Banyak laki-laki yang bergabung dalam barisan pemuda atau gugur di medan tempur, sehingga tanggung jawab sosial dan ekonomi beralih ke tangan perempuan. Handayani (2021) menegaskan bahwa “kondisi darurat pasca-proklamasi menciptakan realitas baru di mana perempuan tidak lagi hanya pengelola rumah tangga, melainkan penggerak komunitas.” Dalam konteks inilah peran perempuan menjadi semakin sentral, baik dalam kehidupan sipil maupun dalam perjuangan bersenjata.

Selain faktor sosial-ekonomi, ideologi nasionalisme juga memengaruhi munculnya kesadaran baru di kalangan perempuan. Propaganda revolusi yang menyebar melalui pidato, pamflet, dan radio menekankan pentingnya partisipasi seluruh rakyat tanpa memandang gender. Seperti dikemukakan oleh Vickers (2005), “revolusi Indonesia adalah proses inklusif yang membuka pintu bagi semua elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam membangun bangsa.” Semangat inilah yang mendorong banyak perempuan untuk bergabung dalam organisasi perjuangan lokal seperti Laskar Wanita Indonesia dan Wanita Republik Indonesia.

Namun, penting dicatat bahwa keterlibatan perempuan pada masa itu tidak serta-merta diakui secara formal. Struktur sosial yang masih patriarkal sering memandang partisipasi perempuan sebagai pelengkap dari perjuangan laki-laki. Hatley (1999) menyebutnya sebagai “participatory marginalization,” yakni situasi di mana perempuan berperan aktif tetapi tetap tidak mendapatkan legitimasi penuh dalam ruang politik. Paradoks ini mencerminkan ketegangan antara ideologi kesetaraan yang diusung revolusi dengan praktik sosial yang masih bias gender.

Dalam konteks lokal, Jawa Timur memiliki kekhasan tersendiri. Budaya pesisir yang terbuka dan tradisi pesantren yang kuat menghasilkan bentuk keterlibatan perempuan yang unik. Banyak perempuan pesantren yang terlibat dalam kegiatan sosial seperti penyediaan makanan dan pengobatan bagi pejuang. Menurut Dewi (2017), “perempuan pesantren memainkan peran ganda sebagai penjaga moral sekaligus penjaga kehidupan di tengah perang.” Keterlibatan ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keagamaan tidak selalu membatasi perempuan, melainkan dapat menjadi sumber motivasi sosial dan spiritual.

Selain itu, munculnya tokoh-tokoh perempuan lokal seperti Siti Mardiyah di Surabaya dan Nani Suwondo di Malang menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk turut serta dalam perjuangan. Mereka menjadi simbol bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar tindakan spontan, tetapi bagian dari kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kemerdekaan dan martabat bangsa. Blackburn (2004) menegaskan bahwa “figur perempuan lokal dalam revolusi adalah manifestasi dari emansipasi yang lahir dari dalam

masyarakat, bukan sekadar adopsi ide Barat.”

Secara keseluruhan, kondisi sosial-politik menjelang pertempuran 10 November menampilkan fase transisi penting bagi perempuan Jawa Timur. Dari individu yang sebelumnya diposisikan sebagai penjaga moral rumah tangga, mereka bertransformasi menjadi subjek sejarah yang aktif. Perubahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebutuhan pragmatis perang, tetapi juga oleh tumbuhnya kesadaran sosial dan nasionalisme. Seperti disimpulkan Handayani (2021), “revolusi 1945 adalah titik balik yang menggeser batas-batas gender dan membuka ruang baru bagi perempuan untuk menegosiasikan identitas sosialnya dalam sejarah bangsa.”

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Pertempuran 10 November

Perempuan Jawa Timur memainkan peran yang sangat beragam selama pertempuran Surabaya, menembus batas-batas tradisional antara ruang domestik dan publik. Keterlibatan mereka tidak sekadar simbolik atau emosional, tetapi bersifat fungsional dan strategis. Seperti dikemukakan Blackburn (2004), “revolusi Indonesia memperlihatkan keterlibatan perempuan sebagai agen sosial yang menegosiasikan ulang makna keberanian dan pengorbanan.” Perempuan tidak hanya hadir di belakang layar, tetapi juga berada di garis depan dalam sistem dukungan sosial dan moral bagi para pejuang.

Salah satu bentuk kontribusi utama perempuan adalah dalam penyediaan logistik dan dapur umum. Selama pertempuran yang berlangsung selama lebih dari tiga minggu, dapur umum menjadi pusat kehidupan sosial dan sumber daya bagi para pejuang. Dewi (2017) mencatat bahwa kelompok perempuan di kawasan Darmo, Kembang Jepun, dan Tanjung Perak membentuk jaringan dapur umum yang menyediakan makanan, air, dan obat-obatan bagi ribuan pejuang. Kegiatan ini memperlihatkan bagaimana kerja-kerja domestik yang sebelumnya dianggap “peran alami perempuan” berubah menjadi tindakan politis yang menopang keberlangsungan perang.

Selain dalam bidang logistik, perempuan juga berperan dalam bidang medis dan keperawatan. Banyak di antara mereka yang sebelumnya menjadi murid sekolah perawat Jepang (kangofu) kini memanfaatkan keterampilan tersebut untuk mendirikan rumah sakit darurat. Menurut Handayani (2021), pos kesehatan yang didirikan perempuan di Surabaya menjadi elemen penting dalam sistem perlawanannya rakyat. Melalui perawatan terhadap tentara dan warga sipil yang terluka, perempuan menegaskan peran mereka sebagai penjaga kehidupan di tengah situasi kehancuran.

Tidak kalah penting, perempuan juga aktif dalam bidang komunikasi dan propaganda. Mereka menjadi kurir pesan antarpos perjuangan, penyebar selebaran, hingga penulis di surat kabar perjuangan seperti Soeara Rakjat dan Merdeka. Hatley (1999) menilai bahwa propaganda yang dibuat oleh perempuan sering kali menekankan nilai moral dan spiritual perjuangan—menampilkan kemerdekaan bukan hanya sebagai kemenangan politik, tetapi juga pembebasan batin. Perempuan dengan demikian memainkan peran ideologis yang penting dalam membangun semangat nasionalisme di kalangan rakyat.

Di beberapa kasus, perempuan bahkan ikut mengangkat senjata. Laporan lisan yang dihimpun oleh Dewi (2017) mencatat bahwa unit Laskar Wanita Indonesia di Tambaksari dan Ketabang berpartisipasi dalam pertempuran dengan tugas ganda: bertempur dan mengawal logistik. Perempuan seperti Nani Suwondo dan Siti Chotijah dikenal sebagai simbol keberanian perempuan Surabaya. Keberadaan mereka menegaskan bahwa revolusi 1945 bukan hanya ruang perjuangan laki-laki, melainkan juga arena perlawanannya perempuan.

Selain peran langsung di medan tempur, perempuan juga berperan sebagai penjaga jaringan sosial di lingkungan masyarakat. Mereka mengorganisasi pengungsian anak-anak,

mendistribusikan bantuan, dan menjaga stabilitas moral keluarga yang ditinggal berperang. Menurut Vickers (2005), “fungsi sosial perempuan selama revolusi adalah mempertahankan kehidupan dalam keadaan di mana negara belum mampu berfungsi.” Dengan kata lain, perempuan menjadi semacam “negara sosial” yang menopang keberlangsungan komunitas.

Partisipasi perempuan dalam bidang keagamaan juga penting dicatat. Banyak kelompok perempuan pesantren, terutama di Sidoarjo dan Jombang, yang turut mendukung perjuangan dengan mengirimkan makanan, pakaian, dan doa bersama untuk para pejuang. Handayani (2021) menyebut bahwa “dukungan moral dari kalangan perempuan pesantren memiliki kekuatan simbolik besar karena menautkan perjuangan dengan nilai jihad dan pengabdian.” Ini menunjukkan bahwa spiritualitas menjadi sumber energi politik bagi perempuan pada masa revolusi.

Keterlibatan perempuan juga memiliki dimensi kultural. Mereka menciptakan lagu perjuangan, drama rakyat, dan puisi yang menggambarkan semangat kemerdekaan. Menurut Hatley (1999), karya seni perempuan selama revolusi memperlihatkan “redefinisi kepahlawanan” yang tidak hanya berbasis kekuatan fisik, tetapi juga ketahanan batin dan kasih. Dengan demikian, perjuangan perempuan tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik—membangun citra perempuan sebagai penjaga nilai kemanusiaan di tengah kekerasan.

Namun, di balik keberanian itu terdapat realitas berat. Banyak perempuan kehilangan keluarga, menjadi korban kekerasan, atau mengalami trauma perang. Dewi (2017) menekankan bahwa penderitaan ini jarang diakui dalam sejarah resmi. Dalam catatan historiografi nasional, narasi penderitaan perempuan lebih sering diposisikan sebagai kisah emosional daripada fakta sosial. Padahal, pengalaman tersebut membentuk karakter dan solidaritas perempuan Surabaya pasca-pertempuran.

Keterlibatan perempuan Jawa Timur dalam pertempuran 10 November memperlihatkan bentuk partisipasi multidimensional: fisik, sosial, ideologis, dan emosional. Perempuan membangun jembatan antara ruang domestik dan publik, menjadikan aktivitas sehari-hari sebagai praktik perlawanan. Dengan meminjam istilah Scott (1986), tindakan perempuan ini merupakan “politik sehari-hari” — sebuah bentuk perlawanan tanpa kekuasaan formal tetapi penuh makna transformatif.

3. Implikasi Sosial dan Ideologis dari Transformasi Peran Perempuan

Transformasi peran perempuan selama pertempuran Surabaya membawa dampak sosial yang luas bagi masyarakat Jawa Timur. Sebagaimana dikatakan Reid (2011), “revolusi bukan hanya tentang perubahan kekuasaan, tetapi juga transformasi struktur sosial yang paling mendasar.” Perempuan yang sebelumnya tidak memiliki posisi dalam struktur kekuasaan tiba-tiba menjadi bagian dari kekuatan sosial baru. Mereka menjadi motor dalam pengorganisasian masyarakat, penjaga moralitas publik, dan pembentuk opini di tengah krisis.

Pengalaman revolusi melahirkan bentuk baru kesadaran sosial di kalangan perempuan. Kesadaran ini bersumber dari realitas bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya milik laki-laki, melainkan perjuangan kolektif seluruh bangsa. Hatley (1999) menyebut bahwa partisipasi perempuan selama revolusi “menghasilkan subjektivitas politik baru” di mana perempuan mulai memandang dirinya sebagai warga negara, bukan sekadar istri atau ibu. Hal ini menjadi fondasi bagi munculnya gerakan perempuan di tahun-tahun berikutnya.

Dampak ideologisnya terlihat jelas pada pasca-perang. Banyak perempuan yang sebelumnya aktif dalam dapur umum atau rumah sakit lapangan kemudian bergabung dalam organisasi sosial-politik seperti Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan Wanita

Republik Indonesia (WRI). Handayani (2021) menegaskan bahwa pengalaman perang menjadi “modal sosial dan simbolik” bagi perempuan untuk menegosiasikan peran mereka di masyarakat baru yang sedang dibangun. Dengan kata lain, revolusi memberi legitimasi moral bagi perempuan untuk menuntut kesetaraan.

Namun, proses transformasi ini tidak berjalan tanpa resistensi. Ketika situasi politik mulai stabil, muncul upaya untuk “mengembalikan” perempuan ke ranah domestik. Blackburn (2004) menyebut fenomena ini sebagai post-revolutionary retraditionalization, di mana peran publik perempuan dianggap tidak lagi relevan setelah perang usai. Media massa dan wacana negara mulai menampilkan citra “ibu bangsa” yang penuh kasih, tetapi tidak berpolitik. Ini menunjukkan kontradiksi antara pengalaman revolusi dan realitas sosial pasca-kemerdekaan.

Kontradiksi ini juga muncul dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Meski banyak perempuan memperoleh pengalaman organisasi selama revolusi, akses terhadap pendidikan tinggi dan jabatan publik tetap terbatas. Scott (1986) menjelaskan bahwa proses seperti ini merupakan bagian dari “mekanisme reproduksi kekuasaan gender,” di mana perubahan sosial tidak otomatis menghasilkan kesetaraan struktural. Perempuan mungkin diakui sebagai pahlawan, tetapi tidak diberi ruang untuk berkuasa.

Secara ideologis, transformasi ini juga mengubah hubungan antara agama, budaya, dan gender. Dalam konteks Jawa Timur yang religius, banyak perempuan menggunakan narasi keagamaan untuk melegitimasi peran publik mereka. Handayani (2021) menunjukkan bahwa perempuan pesantren menafsirkan jihad tidak hanya sebagai perang fisik, tetapi juga sebagai perjuangan sosial untuk melindungi bangsa. Hal ini menunjukkan fleksibilitas ideologis perempuan dalam menggabungkan nilai tradisional dan modern.

Selain itu, pengalaman revolusi menciptakan solidaritas lintas kelas di kalangan perempuan. Perempuan dari kalangan elite, buruh, hingga santri bekerja bersama tanpa sekat sosial. Dewi (2017) menyebut fenomena ini sebagai “egalitarianisme situasional,” yaitu bentuk solidaritas yang lahir karena kesamaan pengalaman penderitaan. Meskipun sementara, pengalaman ini menjadi modal penting bagi pembentukan kesadaran kelas dan gender di masa depan.

Transformasi sosial ini juga memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang strategi bertahan hidup. Vickers (2005) menekankan bahwa perempuan Surabaya “menegosiasi ruang kebebasan di tengah kekacauan, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan jaringan sosial dan kerja kolektif.” Ini menunjukkan bahwa peran sosial perempuan memiliki logika tersendiri yang tidak dapat diukur dengan parameter politik laki-laki.

Dengan demikian, revolusi 1945 membawa dampak ideologis mendalam: perempuan belajar memaknai ulang dirinya sebagai bagian dari sejarah. Dalam istilah Habermas (1984), tindakan sosial perempuan pada masa itu mencerminkan communicative action, yaitu upaya membangun solidaritas dan makna bersama melalui komunikasi sosial. Dari dapur umum hingga medan perang, perempuan membangun jaringan kehidupan yang memungkinkan revolusi bertahan.

4. Rekonstruksi Historiografi dan Urgensi Perspektif Gender

Salah satu problem terbesar dalam studi revolusi Indonesia adalah absennya perempuan dalam narasi resmi sejarah. Meskipun keterlibatan mereka nyata, dokumentasi tentang peran perempuan sering kali terbatas pada kisah lisan atau catatan pinggiran. Hatley (1999) mengkritik hal ini sebagai bentuk historical silencing penghapusan sistematis pengalaman perempuan dari wacana nasionalisme. Dalam konteks pertempuran 10 November, fenomena ini sangat menonjol: nama-nama seperti Bung Tomo dielukakan, sementara figur perempuan hanya disebut secara samar.

Blackburn (2004) menegaskan bahwa historiografi Indonesia modern masih dibangun atas paradigma maskulin yang mengidentikkan kepahlawanan dengan kekuatan fisik dan heroisme militer. Akibatnya, bentuk-bentuk perlawanan non-militer seperti penyediaan logistik, pendidikan, dan moral dianggap kurang penting. Padahal, aspek-aspek inilah yang memungkinkan revolusi bertahan. Dengan menggunakan perspektif gender, kita dapat melihat bahwa peran perempuan bukan sekadar “tambahan,” melainkan bagian dari struktur utama perjuangan sosial.

Pendekatan historiografi berperspektif gender, sebagaimana dikemukakan Scott (1986), tidak hanya menambahkan tokoh perempuan ke dalam sejarah, tetapi juga menantang cara berpikir historis itu sendiri. Ia mengajak sejarawan untuk memeriksa bagaimana kategori gender membentuk struktur narasi, representasi, dan makna peristiwa. Dalam konteks ini, rekonstruksi sejarah perempuan Jawa Timur bukan sekadar koreksi faktual, melainkan pembaruan epistemologis.

Dewi (2017) dan Handayani (2021) telah memulai upaya penting dalam mendokumentasikan pengalaman perempuan Surabaya berdasarkan sumber lokal. Mereka menelusuri arsip komunitas, catatan pesantren, dan kesaksian lisan yang selama ini diabaikan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sejarah dapat ditulis dari bawah dari pengalaman sehari-hari yang menjadi fondasi revolusi. Dengan demikian, sejarah perempuan bukan sekadar pelengkap sejarah nasional, melainkan jantungnya.

Selain itu, penerapan perspektif gender dalam historiografi juga berfungsi sebagai upaya restorative justice. Vickers (2005) menyatakan bahwa “mengembalikan suara perempuan ke dalam sejarah adalah langkah moral untuk membangun bangsa yang setara.” Dengan memahami perjuangan perempuan sebagai bagian integral dari revolusi, kita tidak hanya menulis ulang masa lalu, tetapi juga memperbaiki cara bangsa memandang dirinya sendiri.

Pendekatan ini juga membuka ruang bagi reinterpretasi konsep kepahlawanan. Hatley (1999) berargumen bahwa kepahlawanan perempuan tidak selalu bersifat heroik dalam arti konvensional, melainkan sering muncul dalam bentuk pengorbanan, pengasuhan, dan solidaritas. Dalam konteks ini, perempuan menjadi “pahlawan sosial” penjaga kehidupan di tengah kehancuran. Perspektif ini memperluas makna revolusi dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan kemanusiaan.

Lebih jauh, rekonstruksi historiografi berbasis gender menuntut perubahan metodologis. Sejarawan perlu menggunakan pendekatan interdisipliner menggabungkan sejarah sosial, studi gender, dan antropologi budaya. Habermas (1984) menekankan bahwa pemahaman sejarah yang utuh hanya dapat dicapai jika kita mengakui bahwa tindakan sosial adalah hasil dari komunikasi antar-subjek. Dalam konteks ini, kisah perempuan Surabaya adalah dialog antara moralitas, nasionalisme, dan kemanusiaan.

Penulisan sejarah yang berkeadilan gender bukan hanya tugas akademik, tetapi juga etika nasional. Dengan merekonstruksi kembali kontribusi perempuan Jawa Timur dalam pertempuran 10 November, kita tidak hanya mengembalikan keadilan historis, tetapi juga menghidupkan kembali semangat egalitarian revolusi. Sebagaimana disimpulkan oleh Handayani (2021), “perempuan bukan sekadar penonton sejarah mereka adalah penulisnya yang terlambat diakui.”

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa peran perempuan Jawa Timur dalam Pertempuran 10 November 1945 tidak dapat dipandang sebagai pelengkap atau simbol moral semata, melainkan sebagai kekuatan sosial yang substantif dalam membentuk arah revolusi nasional. Dari ruang dapur hingga garis depan pertempuran, perempuan berpartisipasi

aktif melalui kerja logistik, perawatan medis, penyebaran informasi, hingga propaganda ideologis. Aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya mendukung perjuangan, tetapi turut menjadi pelaku sejarah yang mengubah wajah masyarakat kolonial menuju tatanan sosial baru yang lebih setara. Seperti dicatat oleh Blackburn (2004), revolusi Indonesia memberikan ruang bagi perempuan untuk “menegosiasikan ulang makna keberanian dan pengorbanan,” menempatkan mereka sebagai agen transformatif dalam proses pembentukan bangsa.

Transformasi peran sosial ini tidak hanya berdampak pada struktur sosial, tetapi juga pada kesadaran ideologis perempuan. Pengalaman mereka selama revolusi melahirkan kesadaran baru sebagai warga negara yang memiliki hak politik, sosial, dan moral untuk turut menentukan arah kehidupan berbangsa. Hatley (1999) menilai bahwa momen revolusi menjadi tonggak “subjektivitas politik baru” bagi perempuan Indonesia—sebuah titik di mana identitas perempuan bergeser dari objek sosial menjadi subjek sejarah. Namun, sebagaimana dikritisi oleh Scott (1986), proses ini kemudian direduksi melalui retraditionalisasi pasca-revolusi, di mana narasi negara berupaya mengembalikan perempuan ke ranah domestik dan menyingkirkan pengalaman mereka dari historiografi resmi.

Ketiadaan perempuan dalam narasi sejarah nasional memperlihatkan adanya bias epistemologis yang mengakar dalam penulisan sejarah Indonesia. Handayani (2021) menyoroti bahwa dalam banyak teks sejarah, perempuan sering diposisikan hanya sebagai “ibu bangsa” atau simbol moral, bukan pelaku strategis. Padahal, seperti yang ditunjukkan Dewi (2017) melalui riset lapangan di Surabaya dan sekitarnya, perempuan memiliki peran integral dalam jaringan perlawanan rakyat—baik melalui laskar, dapur umum, maupun sistem komunikasi bawah tanah. Karena itu, rekonstruksi historiografi dengan perspektif gender menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar pelengkap akademik, tetapi juga langkah moral untuk mengembalikan keadilan sejarah.

Dalam konteks sosial budaya, peran perempuan selama pertempuran Surabaya juga menunjukkan kemampuan adaptasi dan integrasi nilai-nilai tradisional dengan semangat modernitas. Perempuan pesantren, misalnya, menafsirkan jihad sebagai perjuangan sosial untuk menjaga kehidupan dan kemerdekaan bangsa (Handayani, 2021). Integrasi nilai agama dan nasionalisme ini mencerminkan fleksibilitas ideologis perempuan Jawa Timur dalam mengartikulasikan peran publik tanpa menanggalkan identitas kulturalnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan tidak hanya bersifat politis, tetapi juga spiritual dan kultural sebuah bentuk emansipasi yang berakar pada nilai lokal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi peran sosial perempuan Jawa Timur selama pertempuran 10 November merupakan wujud konkret dari pergeseran struktur kekuasaan gender dalam masyarakat Indonesia. Revolusi membuka ruang bagi perempuan untuk tampil sebagai penggerak sosial, penjaga moral, dan penyelamat kehidupan di tengah kekacauan perang. Namun, warisan perjuangan mereka belum sepenuhnya diakui dalam narasi resmi bangsa. Karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan historiografi baru yang menggabungkan perspektif gender, sosial, dan budaya untuk menulis sejarah secara lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Dewi, N. K. (2017). Perempuan dalam Revolusi Fisik: Studi Kasus Keterlibatan Perempuan di Surabaya Tahun 1945–1949. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 11(2), 145–162.
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action, Volume 1: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Handayani, T. (2021). Rekonstruksi Historiografi Perempuan Jawa Timur dalam Revolusi

- Nasional Indonesia. *Jurnal Perempuan dan Sejarah*, 9(1), 33–56.
- Hatley, B. (1999). Nation, “Mother,” and Performing Women: Feminism and National Identity in Southeast Asia. *Asian Studies Review*, 23(2), 183–200.
- Reid, A. (2011). Revolutionary Change in Indonesia: The Social Dynamics of Independence. NUS Press.
- Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. *The American Historical Review*, 91(5), 1053–1075.
- Vickers, A. (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press.